



Labeling dan Efek Jerat Kemiskinan (*Poverty Trap*) dalam Wacana Kebijakan Sosial: Analisis Framing Pemberitaan Program Bantuan Sosial di Media Daring Indonesia

Hanum Salsabila^{1*}, Ilham Ramdhan Maulana²

^{1,2} Universitas Alma Ata, Indonesia

Alamat: Jl. Brawijaya No.99, Jadan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : Hanumsalsabila@almaata.ac.id 1, Ilhamramdhanmaulana@almaata.ac.id 2

Korespondensi penulis: Hanumsalsabila@almaata.ac.id

Abstract. Social assistance programs in Indonesia, such as the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), and Direct Cash Assistance (BLT), have become the government's primary instruments in poverty alleviation efforts. However, behind their benefits, these social policies often generate controversial discourse in online media, particularly regarding the practice of labeling beneficiaries and the potential for poverty trap effects a phenomenon where assistance actually creates dependency and hinders social mobility out of poverty. This study aims to analyze how Indonesian online media frame the issues of labeling and poverty traps in news coverage of social assistance programs. Using a qualitative approach with Robert N. Entman's framing analysis model (problem definition, causal attribution, moral evaluation, and treatment recommendation), this study analyzes a number of news articles from leading Indonesian online media outlets during the 2020–2025 period. The findings reveal that online media tend to frame social assistance recipients under two dominant labels: (1) a positive label as "vulnerable citizens who need state protection" and (2) a negative label as "lazy recipients" or "beneficiaries enjoying aid without productivity." This negative labeling framing contributes to social stigmatization of social assistance recipients. Meanwhile, regarding the poverty trap, media report a policy dilemma: on one hand, social assistance is necessary for social protection; on the other hand, there are concerns that assistance creates long-term dependency. This study concludes that the discourse on labeling and poverty traps in social assistance news coverage in Indonesian online media not only reflects policy realities but also shapes public perception and influences future social policy directions. Critical awareness of media labeling practices and social policy design that minimizes poverty trap risks without generating stigmatization is urgently needed.

Keywords: labeling, poverty trap, social assistance, framing analysis, online media, social policy, Indonesia.

Abstrak. Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), telah menjadi instrumen utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, di balik manfaatnya, kebijakan sosial ini kerap memunculkan wacana yang kontroversial di media daring, khususnya terkait praktik pemberian label (labeling) terhadap penerima manfaat serta potensi terjadinya efek jerat kemiskinan (poverty trap) fenomena di mana bantuan justru menciptakan ketergantungan dan menghambat mobilitas sosial keluar dari kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media daring Indonesia membingkai (framing) isu labeling dan poverty trap dalam pemberitaan program bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis framing dari Robert N. Entman (definisi masalah, penyebab masalah, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian), penelitian ini menganalisis sejumlah artikel berita dari media daring terkemuka Indonesia selama periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media daring cenderung membingkai penerima bansos dalam dua label dominan: (1) label positif sebagai "warga rentan yang perlu dilindungi negara" dan (2) label negatif sebagai "penerima malas" atau "penikmat bantuan tanpa produktivitas". Framing labeling negatif ini berkontribusi pada stigmatisasi sosial terhadap penerima bansos. Sementara itu, terkait poverty trap, media memberitakan adanya dilema kebijakan: di satu sisi bansos diperlukan untuk perlindungan sosial, di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa bansos menciptakan ketergantungan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana labeling dan poverty trap dalam pemberitaan bansos di media daring Indonesia tidak hanya merefleksikan realitas kebijakan, tetapi juga turut membentuk persepsi publik dan mempengaruhi arah kebijakan sosial ke depan. Diperlukan kesadaran kritis terhadap praktik labeling media serta desain kebijakan sosial yang meminimalkan risiko poverty trap tanpa menimbulkan stigmatisasi.

Kata kunci: labeling, poverty trap, jerat kemiskinan, bantuan sosial, analisis framing, media daring, kebijakan sosial, Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan telah lama menjadi persoalan struktural yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun angka kemiskinan ekstrem menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencatat bahwa hingga awal tahun 2025, sekitar 9-10 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Menghadapi realitas ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen utama dalam strategi pengentasan kemiskinan nasional.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan sejak 2007 menjadi salah satu program unggulan yang kemudian diperluas cakupannya menjadi salah satu program Conditional Cash Transfer (CCT) terbesar di dunia, menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 40 juta jiwa . Selain PKH, pemerintah juga mengoperasikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang kini bertransformasi menjadi Program Sembako, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kerap digulirkan sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat atau krisis ekonomi.

Di atas kertas, program-program ini telah menunjukkan dampak positif. Evaluasi menunjukkan bahwa PKH berhasil mengurangi angka stunting, meningkatkan angka partisipasi sekolah, dan memperbaiki indikator kesehatan ibu dan anak . Namun, di balik capaian statistik tersebut, realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan sarat dengan kontroversi.

Salah satu masalah paling menonjol yang terus menghantui pelaksanaan bansos di Indonesia adalah persoalan mistargeting atau ketidaktepatan sasaran. Laporan media pada September 2025 mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen penerima bantuan sosial diduga tidak tepat sasaran, dengan lebih dari 1,9 juta rumah tangga menerima manfaat yang seharusnya tidak mereka dapatkan .

Kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara hasil pemeringkatan kemiskinan berbasis data terpadu dengan persepsi masyarakat setempat. Penelitian di komunitas pedesaan Indonesia menemukan bahwa program CCT hanya menjangkau sebagian kecil rumah tangga yang dianggap miskin oleh warga setempat masing-masing hanya 44 persen dan 23 persen dalam dua studi kasus yang berbeda. Sementara itu, banyak penerima yang sesungguhnya sudah tidak lagi dikategorikan sebagai miskin menurut penilaian komunitas .

Mistargeting ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi anggaran, tetapi juga memicu ketegangan sosial di tingkat komunitas. Penghapusan massal 1,9 juta penerima PKH dari database memicu gelombang protes dan keluhan, terutama dari mereka yang merasa menjadi

korban kesalahan sistem atau tuduhan yang tidak berdasar . Kecemburuan sosial, ketegangan antarwarga, dan protes atas distribusi yang tidak adil menjadi pemandangan yang tidak asing lagi di berbagai daerah.

Di luar persoalan teknis penargetan, dimensi sosiokultural dari program bansos juga patut mendapat perhatian serius. Praktik pemberian label (*labeling*) terhadap penerima bantuan sosial telah menciptakan stratifikasi sosial baru di masyarakat. Dalam wacana publik, penerima bansos kerap dibingkai dengan dikotomi yang problematis.

Di satu sisi, mereka dilabeli sebagai "warga rentan" atau "masyarakat miskin" yang membutuhkan uluran tangan negara sebuah label yang meskipun tampak positif, tetap menempatkan mereka dalam posisi inferior sebagai objek bantuan. Di sisi lain, wacana yang lebih destruktif juga bermunculan: penerima bansos dicap sebagai "pemalas", "penikmat bantuan tanpa produktivitas", atau bahkan "kutu loncat" yang sengaja tidak mau bekerja agar tetap menerima bantuan.

Fenomena *labeling* terhadap kelompok penerima bantuan ini memiliki paralel dengan apa yang terjadi dalam konten media sosial tentang kemiskinan. Sebagaimana disoroti oleh dosen Universitas Negeri Yogyakarta Grendi Hendrastomo, konten berbagi yang viral di media sosial kerap menjadikan orang miskin sebagai objek semata sebuah praktik yang disebutnya sebagai objektifikasi kemiskinan . Praktik ini, menurutnya, membangun relasi yang timpang antara pemberi (yang terposisi sebagai pahlawan) dan penerima (yang tergambarkan tidak berdaya), menciptakan hierarki yang problematis .

Labeling negatif terhadap penerima bansos ini bukanlah fenomena yang netral. Ia memiliki konsekuensi nyata: stigmatisasi sosial yang dapat mengakibatkan diskriminasi, isolasi sosial, dan bahkan tekanan psikologis bagi para penerima manfaat. Ketika seseorang terus-menerus dibingkai sebagai "penerima bantuan pemalas", ia mungkin internalisasi label tersebut dan kehilangan motivasi untuk keluar dari kemiskinan sebuah ironi yang tragis.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Labeling (*Labeling Theory*)

2.1.1 Akar Pemikiran dan Perkembangan Teori Labeling

Teori *labeling* (*labeling theory*) berakar dari tradisi interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh para sosiolog seperti *George Herbert Mead*, *Charles Horton Cooley*, dan *Herbert Blumer*. Inti dari perspektif ini adalah pemahaman bahwa realitas sosial tidaklah objektif dan *given*, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial dan proses pemberian makna (*symbolic interaction*). Dalam kerangka ini, label atau julukan yang dilekatkan pada

seseorang atau kelompok tidak netral ia membawa konsekuensi nyata terhadap identitas, perilaku, dan posisi sosial individu atau kelompok tersebut.

Teori labeling dalam bentuknya yang paling berpengaruh dikembangkan oleh Howard S. Becker (1963) dalam bukunya yang berjudul "*Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*". Becker berargumen bahwa deviance (penyimpangan) bukanlah kualitas inheren dari suatu tindakan, melainkan konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi oleh orang lain terhadap pelanggar. Dengan kata lain, seseorang menjadi "devian" bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena ia dilabeli demikian oleh masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan dan menegakkan aturan.

Edwin M. Lemert (1951, 1972) memperkenalkan distingsi penting antara deviance primer (*primary deviance*) dan deviance sekunder (*secondary deviance*). Deviance primer adalah perilaku menyimpang yang bersifat sporadis dan tidak terintegrasi ke dalam konsep diri pelaku. Sebaliknya, deviance sekunder adalah perilaku menyimpang yang muncul sebagai respons terhadap labeling sosial ketika seseorang menerima dan menginternalisasi label yang dilekatkan padanya, kemudian bertindak sesuai dengan label tersebut. Dalam konteks kebijakan sosial, seorang penerima bantuan yang terus-menerus dilabeli sebagai "pemalas" atau "tidak produktif" mungkin akhirnya menginternalisasi label tersebut dan benar-benar berperilaku sesuai dengan ekspektasi negatif masyarakat.

2.1.2 Mekanisme Labeling dan Konsekuensinya

Proses labeling menurut Becker dan Lemert dapat diuraikan menjadi beberapa tahapan:

- a. Penciptaan aturan (*rule creation*): Kelompok dominan dalam masyarakat menciptakan aturan atau norma yang mendefinisikan perilaku tertentu sebagai "baik" atau "buruk", "layak" atau "tidak layak".
- b. Penerapan label (*labeling application*): Otoritas (misalnya aparat, institusi, atau bahkan media massa) menerapkan label kepada individu atau kelompok yang dianggap melanggar aturan atau memenuhi kategori tertentu.
- c. Internalisasi label (*label internalization*): Individu atau kelompok yang dilabeli mulai menerima definisi diri yang diberikan masyarakat.
- d. Penguatan deviance (*deviance amplification*): Individu bertindak sesuai dengan label yang diinternalisasi, yang pada gilirannya memperkuat persepsi masyarakat bahwa label tersebut memang "benar".

Dalam konteks kebijakan bantuan sosial, proses labeling ini bekerja melalui mekanisme serupa. Aturan diciptakan oleh kebijakan: siapa yang dianggap "miskin", siapa yang "layak menerima bantuan", dan kriteria apa yang digunakan untuk menentukan kelayakan. Kemudian, label

diterapkan melalui proses verifikasi data, pemberian status (misalnya "KPM" atau Keluarga Penerima Manfaat), dan pemberitaan media. Selanjutnya, penerima bantuan mungkin mulai menginternalisasi identitas sebagai "orang miskin" atau "penerima bantuan". Akhirnya, terjadi penguatan di mana penerima bantuan berperilaku sesuai dengan ekspektasi label tersebut—misalnya menjadi pasif atau tidak termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan—yang kemudian digunakan untuk membenarkan bahwa bantuan memang menciptakan ketergantungan.

2.1.3 Labeling dalam Konteks Kemiskinan dan Kebijakan Sosial

Penerapan teori labeling dalam kajian kemiskinan dan kebijakan sosial telah menghasilkan wawasan yang kaya. Piven & Cloward (1971, 1993) dalam karya klasik mereka "Regulating the Poor" menunjukkan bahwa sistem bantuan sosial tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk mengatur dan mengontrol populasi miskin. Program bantuan sosial, menurut mereka, berfungsi sebagai mekanisme untuk menenangkan ketidakpuasan sosial di saat krisis, sekaligus menanamkan disiplin dan etos kerja pada penerima bantuan sebuah fungsi yang tidak terlepas dari praktik labeling.

Fraser & Gordon (1994) mengkaji genealogi konsep "ketergantungan" (dependency) dalam wacana kebijakan sosial Amerika Serikat. Mereka menunjukkan bahwa label "dependent" (bergantung) secara historis dilekatkan pada kelompok-kelompok tertentu (perempuan, orang kulit hitam, penerima bantuan) dengan konotasi moral yang negatif. Labeling ini tidak netral: ia berfungsi untuk membedakan antara warga negara yang "produktif" dan "tidak produktif", antara mereka yang "layak" dan "tidak layak" menerima bantuan.

Di Indonesia, penelitian tentang labeling dalam kebijakan sosial masih relatif terbatas. Namun, studi-studi kritis tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) mulai mengangkat isu tentang stigmatisasi penerima bantuan. Kurniawan & Raharjo (2019) menemukan bahwa penerima PKH sering menghadapi prasangka negatif dari tetangga atau masyarakat sekitar yang menganggap mereka "malas bekerja" atau "hanya menunggu bantuan". Labeling semacam ini tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas program dalam jangka panjang.

2.1.4 Labeling dan Media: Framing Sebagai Praktik Labeling

Dalam konteks penelitian ini, media daring dipandang sebagai agen labeling yang sangat berpengaruh. Pemberitaan media tentang program bantuan sosial bukanlah sekadar pelaporan fakta objektif, melainkan proses aktif pemberian label pada penerima bansos. Sebagaimana diargumentasikan oleh Fairclough (1995, 2013) dalam analisis wacana kritis (critical discourse

analysis), media tidak hanya merepresentasikan realitas tetapi juga mengonstruksi realitas melalui pilihan kata, sumber berita, dan narasi yang dibangun.

Praktik labeling oleh media dapat berlangsung secara eksplisit (misalnya menggunakan kata "pemalas", "penikmat bansos") maupun implisit (misalnya dengan terus-menerus mengkaitkan penerima bansos dengan citra negatif atau dengan hanya mewawancarai sumber-sumber yang kritis terhadap program). Media juga dapat melakukan labeling melalui framing cara membingkai suatu isu yang menentukan aspek mana yang ditonjolkan dan mana yang diabaikan.

Penelitian ini akan menggunakan teori labeling sebagai kerangka untuk memahami bagaimana media daring Indonesia (seperti Kompas.com, Detik.com, dan lainnya) melabeli penerima bantuan sosial dalam pemberitaan mereka, serta bagaimana praktik labeling ini berkontribusi pada stigmatisasi sosial terhadap kelompok miskin.

2.2 Teori Jerat Kemiskinan (*Poverty Trap Theory*)

2.2.1 Konsep Dasar dan Tipologi *Poverty Trap*

Poverty trap (jerat kemiskinan) adalah konsep yang merujuk pada situasi di mana kemiskinan bersifat self-reinforcing menguatkan dirinya sendiri sehingga individu, rumah tangga, atau komunitas yang miskin sulit atau bahkan tidak mungkin keluar dari kemiskinan tanpa intervensi eksternal yang substansial. Dalam kondisi poverty trap, mekanisme pasar normal tidak cukup untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan karena terdapat hambatan struktural yang menghalangi akumulasi aset dan investasi pada modal manusia.

Bowles, Durlauf, & Hoff (2006) dalam "Poverty Traps" membedakan beberapa jenis poverty trap:

- a. Poverty trap mekanis (*mechanical poverty trap*): terjadi ketika kemiskinan menghalangi investasi pada aset produktif misalnya petani miskin tidak dapat membeli pupuk atau benih unggul, sehingga produktivitas tetap rendah dan kemiskinan berlanjut.
- b. Poverty trap institusional (*institutional poverty trap*): terjadi ketika aturan, kebijakan, atau praktik institusional termasuk program bantuan sosial yang didesain buruk secara tidak sengaja menciptakan disinsentif bagi penerima untuk keluar dari kemiskinan.
- c. Poverty trap sosiokultural (*sociocultural poverty trap*): terjadi ketika norma sosial, nilai, atau identitas yang terkait dengan kemiskinan menghalangi mobilitas sosial.

Azariadis & Stachurski (2005) merumuskan poverty trap dalam kerangka ekonomi makro, menunjukkan bahwa kemiskinan dapat melanggengkan dirinya sendiri melalui mekanisme threshold effects: di bawah ambang batas tertentu, individu atau rumah tangga tidak dapat

mengakses kredit, pendidikan, atau peluang ekonomi lainnya; di atas ambang batas, akses tersebut terbuka dan memungkinkan mobilitas sosial.

Sachs, McArthur, Schmidt-Traub, Kruk, Bahadur, Faye, & McCord (2004) dalam "Ending Africa's Poverty Trap" mengaplikasikan konsep ini pada konteks negara-negara Afrika, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti beban penyakit, produktivitas pertanian rendah, dan isolasi geografis menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang memerlukan intervensi big push (dorongan besar) untuk diputus.

2.2.2 Poverty Trap dalam Konteks Bantuan Sosial

Dalam literatur kebijakan sosial, perdebatan tentang apakah program bantuan sosial (terutama unconditional cash transfer atau conditional cash transfer) menciptakan poverty trap telah berlangsung intensif. Pendukung bantuan sosial berargumen bahwa bukti empiris menunjukkan program seperti PKH tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang; sebaliknya, mereka meningkatkan modal manusia (kesehatan, pendidikan) yang justru memungkinkan mobilitas sosial keluar dari kemiskinan.

Kritikus bantuan sosial, di sisi lain, memperingatkan tentang potensi work disincentive: ketika bantuan yang diterima cukup besar, mungkin ada insentif bagi penerima untuk tidak bekerja atau tidak meningkatkan pendapatan karena khawatir kehilangan kelayakan menerima bantuan. Dalam konteks CCT seperti PKH, conditionality (syarat yang harus dipenuhi) dirancang untuk mencegah ketergantungan—namun implementasi di lapangan sering tidak sempurna.

Moffitt (1992, 2002) meneliti efek disinsentif kerja dari program bantuan sosial di Amerika Serikat dan menemukan bahwa meskipun dampaknya ada, besarnya relatif kecil dan lebih kompleks daripada yang sering diklaim oleh kritikus. Barrientos & DeJong (2006) meneliti CCT di Amerika Latin dan menemukan bahwa program-program ini secara umum tidak menciptakan ketergantungan, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada desain program dan konteks lokal.

Dalam konteks Indonesia, evaluasi PKH oleh Cahyadi, Hanna, Olken, Prima, Satriawan, & Syamsulhakim (2018) menggunakan desain eksperimental (randomized controlled trial) menunjukkan bahwa PKH berhasil meningkatkan indikator kesehatan dan pendidikan, dan tidak menemukan bukti signifikan tentang efek disinsentif kerja atau ketergantungan jangka panjang. Namun, studi ini mengukur outcome jangka pendek (2-3 tahun) dan belum dapat menjawab pertanyaan tentang efek jangka panjang.

Di sisi lain, penelitian kualitatif tentang implementasi PKH sering mengangkat cerita tentang penerima yang merasa "terjebak": mereka tetap miskin meskipun sudah menerima

bantuan selama bertahun-tahun, dan merasa tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup di luar bantuan. Priyono & Prasetyo (2017) menemukan bahwa beberapa penerima PKH mengembangkan pola pikir ketergantungan, meskipun mereka mengakui bahwa bantuan sangat membantu kebutuhan sehari-hari.

2.2.3 Kritik terhadap Wacana Poverty Trap

Penting untuk dicatat bahwa wacana tentang poverty trap dalam bantuan sosial tidak netral ia sering digunakan secara politis oleh kelompok-kelompok tertentu yang menentang perluasan program bantuan sosial. Fraser & Gordon (1994) menunjukkan bahwa akusasi tentang "ketergantungan" penerima bantuan memiliki sejarah panjang yang terkait dengan ras, gender, dan ideologi neoliberal tentang etos kerja.

Di Indonesia, narasi bahwa bansos menciptakan "mental pemalas" atau "budaya kemiskinan" telah digunakan untuk mendukung kebijakan pengurangan bantuan atau peningkatan conditionality yang lebih ketat. Narasi ini sering muncul dalam pemberitaan media, baik dalam bentuk artikel opini maupun liputan fakta yang dipilih secara selektif.

Penelitian ini akan menggunakan teori poverty trap sebagai kerangka untuk memahami bagaimana wacana tentang poverty trap dikonstruksi dalam pemberitaan media—bukan untuk memverifikasi klaim tentang ada tidaknya poverty trap secara objektif (itu ranah evaluasi kebijakan), tetapi untuk memahami bagaimana klaim-klaim tersebut dibingkai, siapa yang mengartikulasikannya, dan apa konsekuensi dari framing tersebut.

2.3 Analisis Framing (*Framing Analysis*)

2.3.1 Akar Teoretis Analisis Framing

Analisis framing berakar dari tradisi sosiologi dan psikologi sosial, terutama dari karya Erving Goffman (1974) dalam bukunya "Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience". Goffman mendefinisikan frame sebagai "definisi situasi" yang memungkinkan individu memahami apa yang terjadi di sekitarnya dan merespons secara tepat. Frame berfungsi sebagai "prinsip organisasi" yang mengatur peristiwa dan pengalaman sosial.

Gregory Bateson (1955, 1972) sebelumnya telah memperkenalkan konsep "frame" dalam studinya tentang komunikasi hewan dan manusia, menunjukkan bahwa setiap pesan memiliki "meta-pesan" yang memberi petunjuk tentang bagaimana pesan tersebut harus diinterpretasikan. Dalam komunikasi, frame berfungsi sebagai konteks yang menentukan makna.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis wacana kritis (critical discourse analysis) yang dioperasionalkan melalui model analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman (1993). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana media daring Indonesia membingkai (framing) isu labeling dan poverty trap dalam pemberitaan program bantuan sosial, bukan untuk mengukur frekuensi atau korelasi kuantitatif.

Pendekatan analisis framing Entman dipilih karena model ini menawarkan kerangka yang sistematis dan operasional untuk mengkaji bagaimana teks berita mengkonstruksi realitas melalui empat dimensi utama: (1) definisi masalah, (2) identifikasi penyebab, (3) evaluasi moral, dan (4) rekomendasi penyelesaian. Model ini telah banyak digunakan dalam penelitian media di Indonesia dan terbukti efektif untuk meneliti pemberitaan kebijakan publik.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan apa yang diberitakan oleh media, tetapi juga menganalisis mengapa framing tertentu muncul, siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh framing tersebut, serta apa implikasi sosial-politik dari framing yang dominan.

3.2 Objek dan Fokus Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Tabel 1 pemberitaan program bantuan sosial di media daring Indonesia

Program Bantuan Sosial	Deskripsi Singkat	Periode Analisis
Program Keluarga Harapan (PKH)	Program conditional cash transfer (CCT) terbesar di Indonesia, memberikan bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan	2020-2025
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / Program Sembako	Bantuan pangan dalam bentuk non-tunai yang dapat digunakan untuk membeli bahan makanan di e-warung	2020-2025
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Bantuan tunai tanpa syarat, terutama yang digulirkan saat pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi	2020-2025

3.2.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana media daring membingkai dua aspek dari pemberitaan bansos:

- Labeling terhadap penerima bantuan sosial: Bagaimana media melabeli penerima bansos (misalnya sebagai "warga rentan yang perlu dilindungi", "penerima malas", "penikmat bantuan tanpa produktivitas", dll.)
- Wacana poverty trap (jerat kemiskinan): Bagaimana media mengkonstruksi isu tentang potensi ketergantungan, disinsentif kerja, dan hambatan mobilitas sosial akibat program bansos

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Data

Penelitian ini menganalisis 72 artikel berita dari empat media daring Indonesia (Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, dan Liputan6.com) selama periode 2020–2025. Distribusi artikel berdasarkan media dan program bantuan sosial disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Distribusi Artikel Berdasarkan Media dan Program Bansos

Media	PKH	BPNT/Sembako	BLT	Total
Kompas.com	6	5	7	18
Detik.com	7	5	6	18
Tempo.co	6	5	6	17
Liputan6.com	6	5	8	19
Total	25	20	27	72

4.1.2 Wacana Poverty Trap dalam Pemberitaan Bansos

Dari 31 artikel yang secara dominan membahas isu poverty trap, penelitian ini mengidentifikasi tiga narasi utama yang dikonstruksi oleh media.

Tabel 4.2 Distribusi Narasi Poverty Trap di Media Daring

Narasi Poverty Trap	Kompas.com	Detik.com	Tempo.co	Liputan6.com	Total (%)
"Bansos menciptakan ketergantungan"	2	5	1	4	12 (39%)
"Bansos menghambat mobilitas sosial"	3	3	2	3	11 (35%)
"Dilema: perlindungan vs kemandirian"	3	2	4	2	11 (35%)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Praktik Labeling Media sebagai Bentuk Kekuasaan Simbolik

Temuan tentang dominasi labeling positif di Kompas.com dan Tempo.co serta labeling negatif di Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa media daring Indonesia tidak homogen dalam merepresentasikan penerima bansos. Hal ini mengonfirmasi argumen Fairclough (1995) bahwa media bukanlah cermin netral realitas, melainkan agen yang secara aktif mengkonstruksi realitas melalui praktik diskursif yang sarat kepentingan.

Labeling positif yang membingkai penerima bansos sebagai "warga rentan yang perlu dilindungi negara" dapat dipahami dalam kerangka teori labeling Becker (1963): label yang dilekatkan pada suatu kelompok membawa konsekuensi terhadap bagaimana kelompok tersebut diperlakukan. Dalam hal ini, label positif berpotensi menghasilkan perlakuan yang lebih manusiawi dan empatik. Namun, perlu diingat bahwa label positif sekalipun tetap mengandung bahaya: ia menempatkan penerima bansos dalam posisi inferior sebagai "objek perlindungan", bukan subjek yang memiliki agensi.

Sebaliknya, labeling negatif yang membingkai penerima bansos sebagai "pemalas" atau "tidak produktif" memiliki konsekuensi yang lebih berbahaya. Dalam kerangka Lemert (1972), labeling negatif dapat memicu secondary deviance: ketika seseorang terus-menerus dilabeli sebagai pemalas, ia mungkin menginternalisasi label tersebut dan benar-benar berperilaku sesuai dengan ekspektasi negatif masyarakat. Ini adalah ironi tragis: stigma yang dihasilkan oleh pemberitaan media justru dapat memperkuat perilaku yang dikritik oleh media itu sendiri.

Praktik labeling oleh media juga merupakan bentuk kekuasaan simbolik (symbolic power) dalam kerangka Bourdieu (1991). Media memiliki kekuatan untuk mendefinisikan realitas sosial, termasuk menentukan siapa yang dianggap "layak" dan "tidak layak" menerima bantuan. Kekuasaan ini tidak netral—ia dapat memperkuat hierarki sosial yang ada dengan menstigmatisasi kelompok miskin sebagai "yang lain" yang berbeda dari warga negara "normal" yang produktif.

4.2.2 Konstruksi Wacana Poverty Trap: Antara Fakta dan Ideologi

Temuan tentang tiga narasi poverty trap mencerminkan kompleksitas wacana seputar kebijakan bansos di Indonesia. Narasi "bansos menciptakan ketergantungan" yang dominan di Detik.com dan Liputan6.com memiliki kemiripan dengan wacana neoliberal tentang welfare dependency yang dikritik oleh Fraser & Gordon (1994). Mereka menunjukkan bahwa akusasi "ketergantungan" terhadap penerima bantuan memiliki sejarah panjang yang terkait dengan ras, gender, dan ideologi tentang etos kerja.

Narasi "bansos menghambat mobilitas sosial" yang dominan di Kompas.com dan Tempo.co lebih bernuansa struktural. Narasi ini mengakui bahwa masalahnya bukan pada "kemalasan" penerima, tetapi pada desain kebijakan yang tidak terintegrasi dengan program pemberdayaan. Pandangan ini sejalan dengan Piven & Cloward (1971, 1993) yang berargumen bahwa sistem bantuan sosial sering didesain untuk mengatur dan mengontrol populasi miskin, bukan untuk benar-benar mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Narasi "dilema: perlindungan vs kemandirian" yang paling dominan di Tempo.co adalah yang paling bernuansa dan reflektif. Narasi ini mengakui bahwa tidak ada jawaban sederhana: menghilangkan bansos akan membahayakan mereka yang benar-benar rentan, sementara mempertahankan bansos tanpa reformasi dapat menciptakan ketergantungan. Dalam perspektif Moffitt (1992, 2002), efek disinsentif kerja dari program bansos memang ada, tetapi besarnya relatif kecil dan sering dibesar-besarkan oleh kritikus.

Menariknya, tidak ada satu media pun yang secara sistematis membahas bukti empiris bahwa bansos di Indonesia (khususnya PKH) secara umum tidak menciptakan ketergantungan signifikan. Studi Cahyadi, Hanna, Olken, Prima, Satriawan, & Syamsulhakim (2018)

menggunakan desain randomized controlled trial (RCT) menemukan bahwa PKH berhasil meningkatkan indikator kesehatan dan pendidikan, dan tidak menemukan bukti signifikan tentang efek disinsentif kerja. Fakta ini jarang muncul dalam pemberitaan yang dianalisis.

4.2.3 Isu Mistargeting: Titik Temu Antara Labeling dan Poverty Trap

Isu mistargeting (ketidaktepatan sasaran) menjadi tema yang melintasi berbagai framing baik positif maupun negatif. Temuan tentang warga yang mengeluh karena "orang dalam" atau pejabat desa justru menjadi penerima bansos (Tempo.co, 18 Juli 2023) mengindikasikan bahwa mistargeting bukanlah isu teknis belaka, tetapi juga isu keadilan sosial dan kepercayaan publik.

Dalam perspektif teori labeling, mistargeting memperkuat labeling negatif terhadap penerima bansos secara keseluruhan. Ketika publik melihat bahwa penerima bansos termasuk mereka yang sebenarnya "tidak layak" (misalnya pejabat desa atau keluarga mampu), maka semua penerima bansos berisiko dicap dengan label negatif yang sama. Ini adalah contoh dari *guilt by association*: beberapa penerima curang mencemari reputasi seluruh kelompok.

Dalam perspektif poverty trap, mistargeting juga memperkuat wacana bahwa bansos adalah "program yang gagal" dan seharusnya dikurangi atau dihentikan. Kritikus bansos dapat menggunakan kasus mistargeting sebagai bukti bahwa sistem

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Praktik Labeling Penerima Bansos di Media Daring Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa media daring Indonesia tidak homogen dalam melabeli penerima bantuan sosial. Dua kategori utama labeling teridentifikasi: labeling positif dan labeling negatif. Labeling positif, yang dominan di Kompas.com dan Tempo.co, membingkai penerima bansos sebagai "warga rentan yang perlu dilindungi negara" (36% dari total artikel) dan "penerima manfaat yang patut didukung" (19%). Labeling negatif, yang dominan di Detik.com dan Liputan6.com, membingkai penerima bansos sebagai "penerima malas/tidak produktif" (22%), "penikmat bantuan tanpa kontribusi" (14%), dan "penerima yang tidak layak/curang" (14%).

5.1.2 Konstruksi Wacana Poverty Trap dalam Pemberitaan Bansos

Penelitian ini mengidentifikasi tiga narasi utama tentang poverty trap yang dikonstruksi oleh media daring Indonesia. Narasi pertama, "bansos menciptakan ketergantungan" (39% dari artikel yang membahas poverty trap), dominan di Detik.com dan Liputan6.com, membingkai bansos sebagai penyebab utama ketergantungan sosial di mana penerima lebih memilih menerima bantuan daripada berusaha mandiri. Narasi kedua, "bansos menghambat mobilitas

sosial" (35%), dominan di Kompas.com dan Tempo.co, membingkai poverty trap sebagai masalah struktural di mana sistem bansos yang tidak terintegrasi dengan program pemberdayaan menyebabkan penerima sulit keluar dari kemiskinan. Narasi ketiga, "dilema: perlindungan vs kemandirian" (35%), paling dominan di Tempo.co, membingkai isu poverty trap sebagai dilema kebijakan yang kompleks tanpa jawaban mudah.

5.1.3 Variasi Framing Antar Media dan Faktor Penentunya

Penelitian ini menemukan variasi framing yang signifikan antar media. Kompas.com dan Tempo.co cenderung menggunakan framing struktural dengan labeling positif, sumber berita dari akademisi/aktivis, serta narasi poverty trap yang berfokus pada hambatan mobilitas dan dilema kebijakan. Sebaliknya, Detik.com dan Liputan6.com cenderung menggunakan framing individual/kultural dengan labeling negatif, sumber berita dari warga dan pejabat pemerintah, serta narasi poverty trap yang berfokus pada ketergantungan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian dengan Metode Campuran (Mixed Methods) : Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkombinasikan analisis framing dengan survei publik untuk mengukur secara kuantitatif dampak framing media terhadap persepsi publik tentang bansos dan penerimanya. Desain eksperimental (misalnya survey experiment dengan manipulasi framing) dapat mengidentifikasi hubungan kausal antara konsumsi berita dan sikap terhadap kebijakan sosial.
- b. Studi Longitudinal tentang Evolusi Framing: Diperlukan penelitian longitudinal yang melacak bagaimana framing pemberitaan bansos berevolusi dari waktu ke waktu, terutama terkait dengan siklus politik (Pemilu) dan krisis ekonomi. Penelitian semacam ini dapat mengungkap apakah media cenderung membingkai bansos secara lebih positif menjelang Pemilu (sebagai "program pemerintah yang berhasil") atau justru lebih kritis (sebagai "politik uang").
- c. Analisis Framing Lintas Platform: Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan tidak hanya pada media daring konvensional tetapi juga pada platform media sosial (TikTok, Instagram, X/Twitter) di mana wacana tentang bansos juga berkembang pesat. Analisis komparatif antara framing di media arus utama versus media sosial dapat mengungkap dinamika wacana yang berbeda.

5.2.2 Saran untuk Jurnalis dan Media Daring

- a. Meningkatkan Kesadaran akan Dampak Labeling: Jurnalis dan redaksi media perlu meningkatkan kesadaran bahwa praktik labeling terhadap penerima bansos bukanlah

hal yang netral. Penggunaan kata seperti "pemalas", "penikmat bantuan", atau sebaliknya "warga miskin yang tak berdaya" memiliki konsekuensi nyata terhadap stigmatisasi atau dehumanisasi. Disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih netral dan manusiawi, misalnya "keluarga penerima manfaat" tanpa tambahan atribut moral.

- b. Mengimbangi Narasi Ketergantungan dengan Bukti Empiris: Pemberitaan tentang potensi poverty trap perlu diimbangi dengan penyajian bukti empiris dari evaluasi program yang kredibel. Jurnalis disarankan untuk mengakses dan mengutip studi akademis atau evaluasi independen (seperti dari Bank Dunia, SMERU Institute, atau J-PAL) yang menunjukkan bahwa bansos di Indonesia secara umum tidak menciptakan ketergantungan signifikan. Penyajian bukti yang seimbang akan membantu publik memahami kompleksitas isu.
- c. Memperluas Sumber Berita: Media disarankan untuk tidak hanya mengandalkan sumber berita dari pejabat pemerintah atau warga yang kebetulan diwawancarai. Akademisi, peneliti kebijakan, aktivis, dan penerima bansos sendiri perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk berbicara. Perspektif penerima bansos sebagai subjek yang memiliki suara dan agensi selama ini sangat minim dalam pemberitaan yang dianalisis.

5.2.3 Saran untuk Pembuat Kebijakan

- a. Membangun Komunikasi Publik yang Proaktif: Pemerintah (terutama Kementerian Sosial) perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang proaktif untuk melawan narasi stigmatisasi dan misinformasi tentang bansos. Hal ini dapat dilakukan melalui rilis data berkala, media briefing dengan jurnalis, serta kampanye literasi publik tentang tujuan dan dampak program.
- b. Transparansi Data dan Evaluasi: Untuk mengatasi isu mistargeting yang terus menerus muncul dalam pemberitaan, pemerintah perlu meningkatkan transparansi data dan evaluasi berkala yang dipublikasikan secara terbuka. Publik perlu diyakinkan bahwa pemerintah serius memperbaiki akurasi sasaran, bukan hanya sekadar memberi bantuan tanpa kontrol.
- c. Mengintegrasikan Bansos dengan Program Pemberdayaan: Untuk merespons secara substantif wacana poverty trap, pemerintah perlu secara serius mengintegrasikan program bansos dengan program pemberdayaan ekonomi (pelatihan, akses permodalan, pendampingan usaha). PKH sebagai CCT telah memiliki komponen pemberdayaan, tetapi implementasinya masih lemah. Penguatan komponen pemberdayaan dapat memutus rantai potensi ketergantungan sekaligus menjawab kritik.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, W., Herizal, & Rasanjani, S. (2024). The phenomenon of congregational graduation of PKH recipients after the labelling policy. *Futurity of Social Sciences*, 2(4), 84–100.
- Habibullah, H., Yuda, T. K., Setiawan, H. H., & Susantyo, B. (2024). Moving beyond stereotype: A qualitative study of long-standing recipients of the Indonesian conditional cash transfers (CCT/PKH). *Social Policy & Administration*, 58(1), 108–121.
- Habibullah, H., Yuda, T. K., Setiawan, H. H., & Susantyo, B. (2024). Stigma paradox and welfare rights claiming. *Forum for Development Studies*, 51(2), 289–300.
- Pertiwi, C., Oktarina, A., Suprianto, Y., Widjajawati, E., Alkadri, A., Nababan, F. E., Rucianawati, R., Aziz, N. L. L., Nadila, S. M., & Fitriana, N. (2025). The effectiveness of social assistance distribution policy for extreme poverty eradication in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 40(1), 1–22.
- Nurlita, I., Utami, D. A., Saud, M., Isbandono, P., & Ibrahim, A. (2025). Portrayal of social assistance in digital media news regarding the 2024 presidential election in Indonesia. *Development in Practice*, 35(2), 1–15.
- Affandi, A. F. M., & Ramdani, A. H. (2025). "Makan Bergizi Gratis" program policy in media framing: A study of iNews.id. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, 11(2), 148–157.
- Pertiwi, I. D., Susanti, D., & Suryaningtyas, A. A. (2025). Protection policy on domestic workers in Indonesia: Framing analysis of online media detik.com and kompas.com. *BIS Humanities and Social Science*, 2, V225021.
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York, NY: Free Press.
- Azariadis, C., & Stachurski, J. (2005). Poverty traps. In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), *Handbook of economic growth* (Vol. 1, pp. 295–384). Elsevier.
- Bowles, S., Durlauf, S. N., & Hoff, K. (Eds.). (2006). *Poverty traps*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Fraser, N., & Gordon, L. (1994). A genealogy of dependency: Tracing a keyword of the U.S. welfare state. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 19(2), 309–336.
- Moffitt, R. A. (1992). Incentive effects of the U.S. welfare system: A review. *Journal of Economic Literature*, 30(1), 1–61.
- Lemert, E. M. (1972). *Human deviance, social problems, and social control* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2018). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. NBER Working Paper No. 24670.